



Wewenang Kejaksaan Tinggi Bali Dalam Litigasi Perdata: Perspektif Hukum Dan Implementasinya

I Made Adi Ananda Permana¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas, Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar, Bali, 80224, Indonesia

Abstract

Pengajuan : 29 Agustus 2025
Revisi : 8 Februari 2026
Diterima : 8 Februari 2026

Keywords: Civil Litigation, Legal Implementation, Perspective

This study examines the authority of the Bali High Prosecutor's Office in civil litigation, focusing on its legal basis, implementation, and the challenges faced in practice. As the state attorney, the Bali High Prosecutor's Office plays a crucial role in safeguarding the state's legal interests, including filing lawsuits, providing defense, and resolving disputes related to state assets, government contracts, and public interests. The research employs a descriptive qualitative method through observation, interviews, and document analysis conducted during field practice at the Bali High Prosecutor's Office. The findings reveal that the institution holds broad authority but encounters obstacles such as limited human resources and low public awareness of its role in civil litigation.

Abstraksi

Penelitian ini membahas kewenangan Kejaksaan Tinggi Bali dalam litigasi perdata, dengan menitikberatkan pada titik hukum, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Sebagai pengacara negara, Kejaksaan Tinggi Bali berperan penting dalam melindungi kepentingan hukum negara, termasuk pengajuan gugatan, pembelaan, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan aset negara, kontrak pemerintah, dan kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, serta analisis dokumen selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di Kejaksaan Tinggi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Bali memiliki kewenangan yang luas, namun menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perannya dalam litigasi perdata.

Keywords: Litigasi Perdata, Perspektif Hukum, Implementasi

Penulis Korespondensi:

I Made Adi Ananda Permana
Email: adiananda68@gmail.com

PENDAHULUAN

Litigasi perdata merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia, yang melibatkan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak dengan kepentingan hukum yang bersaing (Guan & Oktaviani, 2021). Dalam hal ini, Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis sebagai



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

pengacara negara. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga kepentingan hukum negara, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam berbagai jenis perkara perdata yang berhubungan dengan hak dan kewajiban negara. Peran ini semakin penting mengingat adanya keterlibatan negara dalam banyak perkara yang berpotensi mempengaruhi kepentingan publik, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam, kebijakan publik, maupun kontrak-kontrak antara negara dan pihak swasta (Latuconsina & Gultom, 2024).

Kejaksaan Tinggi Bali, sebagai instansi vertikal dari Kejaksaan Agung, memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menangani perkara perdata yang melibatkan negara atau lembaga negara di wilayah Bali. Kewenangan ini mencakup pengajuan gugatan, permohonan, dan pembelaan dalam sengketa perdata yang berhubungan dengan aset negara, kontrak-kontrak pemerintahan, atau sengketa administratif yang melibatkan pemerintah daerah (Saraswati & Prabawati, 2025). Kejaksaan Tinggi Bali tidak hanya bertindak sebagai pihak yang mewakili negara dalam litigasi, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil oleh negara dalam konteks perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya peran Kejaksaan Tinggi dalam litigasi perdata juga tercermin dari dampak yang ditimbulkan terhadap tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Perkara perdata yang ditangani oleh Kejaksaan berhubungan langsung dengan kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya daerah, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Acknaasya & Mumpuni, 2024). Oleh karena itu, Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Kejaksaan Tinggi Bali dalam bidang litigasi perdata, dengan fokus pada aspek hukum yang mendasari wewenang Kejaksaan Tinggi Bali, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta peran kejaksaan dalam menjaga integritas sistem hukum di Bali. Dalam penelitian ini, penulis akan menggali lebih dalam bagaimana Kejaksaan Tinggi Bali

menjalankan tugas sebagai pengacara negara, serta kontribusinya terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan di tingkat daerah. Proses penelitian ini dilaksanakan selama praktik kerja lapangan di Kejaksaan Tinggi Bali, yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan litigasi. Hal ini memungkinkan penulis untuk memahami dinamika pekerjaan kejaksaan di lapangan, serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapi perkara-perkara perdata. Dengan pendekatan langsung ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang peran kejaksaan dalam menjaga keadilan dan integritas hukum di Bali.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan selama praktik kerja lapangan di Kejaksaan Tinggi Bali, di mana penulis secara langsung terlibat dalam observasi proses litigasi perdata yang sedang berlangsung. Data yang digunakan berasal dari wawancara dengan jaksa yang terlibat dalam perkara perdata, dokumen perkara, serta catatan observasi penulis selama praktik kerja lapangan. Selama praktik kerja lapangan, penulis melakukan pengamatan terhadap proses penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan Kejaksaan Tinggi Bali sebagai pihak yang mewakili negara. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait, termasuk jaksa, pegawai administratif, dan pengacara yang terlibat dalam perkara tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memahami kewenangan Kejaksaan Tinggi Bali dalam konteks litigasi perdata serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

HASIL

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama praktik kerja lapangan di Kejaksaan Tinggi Bali, ditemukan bahwa Kejaksaan Tinggi Bali memiliki kewenangan yang cukup luas dalam bidang litigasi perdata. Kewenangan tersebut mencakup pengajuan gugatan atau pembelaan dalam perkara yang melibatkan negara, serta menjalankan tugas sebagai pengacara negara dalam



sengketa yang berkaitan dengan kepentingan publik dan negara. Dalam menjalankan fungsinya, Kejaksaan bertindak sebagai penjaga kepentingan negara dengan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh negara atau pihak yang mewakili negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Bali memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi aset negara dan memastikan bahwa segala keputusan pengadilan yang melibatkan negara dilaksanakan dengan adil dan sesuai prosedur yang berlaku.

Keberadaan Kejaksaan Tinggi Bali juga sangat signifikan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah daerah dan pihak ketiga, baik individu maupun badan hukum. Mereka sering terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara, seperti sengketa terkait kontrak-kontrak pemerintah dan pengelolaan sumber daya alam atau infrastruktur. Proses litigasi yang dijalani memerlukan keahlian khusus dalam bidang hukum perdata, serta pemahaman yang mendalam terhadap berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan negara. Dengan demikian, Kejaksaan Tinggi Bali tidak hanya berperan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengacara negara, tetapi juga berperan sebagai pengawasan dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap transaksi atau sengketa yang melibatkan negara.

PEMBAHASAN

Tantangan utama yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Bali dalam pelaksanaan litigasi perdata adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten di bidang hukum perdata. Meskipun Kejaksaan memiliki banyak jaksa yang terlatih, namun jumlahnya sering kali tidak sebanding dengan volume kasus yang harus ditangani. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran Kejaksaan dalam proses litigasi perdata juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam perkara perdata, baik dalam gugatan maupun pembelaan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai peran yang seharusnya dimainkan oleh Kejaksaan dalam setiap proses litigasi, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung proses



hukum yang melibatkan negara.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kejaksaan Tinggi Bali telah berupaya secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan berkala yang ditujukan kepada jaksa dan staf yang terlibat langsung dalam proses litigasi perdata. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang perkembangan hukum, serta teknik-teknik terbaru dalam menangani perkara perdata yang melibatkan negara. Kejaksaan juga berusaha meningkatkan kesadaran publik mengenai perannya melalui sosialisasi dan kampanye hukum, agar masyarakat lebih memahami kontribusi Kejaksaan dalam menjaga kepentingan negara dan publik. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan tantangan dalam pelaksanaan litigasi perdata dapat diatasi, serta peran Kejaksaan dalam sistem hukum semakin diperkuat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Tinggi Bali memiliki kewenangan yang luas dalam bidang litigasi perdata, khususnya dalam mengajukan gugatan, pembelaan, dan menjalankan tugasnya sebagai pengacara negara. Kewenangan ini berfokus pada perlindungan aset negara, pengelolaan kontrak-kontrak pemerintah, dan sengketa yang melibatkan kepentingan publik. Namun, tantangan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Bali, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat yang rendah mengenai peran Kejaksaan dalam litigasi perdata, masih menjadi hambatan signifikan. Kejaksaan telah berusaha mengatasi masalah ini melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya sosialisasi yang lebih intensif.

SARAN

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengaruh peningkatan pelatihan terhadap kualitas sumber daya manusia di Kejaksaan Tinggi Bali, serta mengeksplorasi lebih lanjut peran Kejaksaan dalam menjaga integritas hukum dan keadilan di masyarakat Bali.



Penelitian berikutnya juga bisa fokus pada evaluasi dampak dari sosialisasi hukum terhadap pemahaman masyarakat mengenai peran Kejaksaan dalam litigasi perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Acknaasya, A. A., & Mumpuni, N. W. R. (2024). Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Perkara Perdata: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi DIY. *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 2320-2329. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.7109>
- Guan, Y., & Oktaviani, E. (2021). Meningkatkan Efisiensi Peradilan Dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 352-370. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.6396>
- Latuconsina, M. A. R. L., & Gultom, E. (2024). Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Mewakili BUMN Sebagai Pihak Termohon Dalam Suatu Permohonan Kepailitan Dan PKPU. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 09-13. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3643>
- Saraswati, N. K. A. P., & Prabawati, N. P. A. (2025). Optimalisasi Peran Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Bali Dalam Meningkatkan Citra Positif. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(3), 1-8. <https://doi.org/10.61292/shkr.249>

